DOKUMEN EVALUASI KINERJA PEGAWAI

PERIODE : TAHUNAN 2024

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

PERIODE PENILAIAN:
1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

1.	PEGAWAI YANG DINILAI		
	NAMA	:	OKY HARIS SETYAWAN, S.STP, M.M
	NIP	:	198510102003121001
	PANGKAT/GOL RUANG	:	Pembina / IV/a
	JABATAN	:	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM
	UNIT KERJA	:	SUB BAGIAN PROGRAM
2.	PEJABAT PENILAI KINERJA		
	NAMA	:	RUDI NUGROHO, SE.,M.M.
	NIP	:	197005241996031003
	PANGKAT/GOL RUANG	:	Pembina Tingkat I / IV/b
	JABATAN	:	SEKRETARIS
	UNIT KERJA	:	SEKRETARIAT BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	ATASAN PEJABAT PENILAI KINERJA		
	NAMA	:	SLAMET, AK
	NIP	:	196602151986031001
	PANGKAT/GOL RUANG	:	Pembina Utama Madya / IV/d
	JABATAN	:	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	UNIT KERJA	:	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4.	EVALUASI KINERJA		
	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	:	-
	PREDIKAT KINERJA PEGAWAI	:	BAIK
5.	CATATAN/REKOMENDASI		

Kota Semarang, 2 Januari 2025
7. Pegawai yang Dinilai

OKY HARIS SETYAWAN, S.STP, M.M
198510102003121001

Kota Semarang, 3 Januari 2025
6. Pejabat Penilai Kinerja

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BPKAD

RUDI NUGROHO, SE.,M.M.
197005241996031003

EVALUASI KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF

PERIODE: TAHUNAN 2024

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	OKY HARIS SETYAWAN, S.STP, M.M	1	NAMA	RUDI NUGROHO, SE.,M.M.
2	NIP	198510102003121001	2	NIP	197005241996031003
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina / IV/a	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b
4	JABATAN	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM	4	JABATAN	SEKRETARIS
5	UNIT KERJA	SUB BAGIAN PROGRAM	5	UNIT KERJA	SEKRETARIAT BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

-

POLA DISTRIBUSI:

HASIL KERJA

NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET / SESEUAI EKSPEKTASI	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
UTAMA							
1	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah Yang Sesuai Kaidah Perundangan	Tersusunnya dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kuantitas	Jumlah Surat Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda dan Raperkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah	35 dokumen	35 Dokumen berdasarkan SK Pertanggungjawaban APBD 35 Kab/Kota Se-Jateng TA 2023	Pimpinan:
			Waktu	Lamanya waktu yang dibutuhkan	3 Bulan	3 Bulan berdasarkan SK Pertanggungjawaban APBD 35 Kab/Kota Se-Jateng TA 2023	Pimpinan:

HASIL KERJA							
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET / SESEUAI EKSPEKTASI	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah Yang Sesuai Kaidah Perundangan	Tersusunnya dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Kuantitas	Jumlah Surat Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda dan Raperkada tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah	35 dokumen	34 Dokumen berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah tentang Hasil Evaluasi Raperda dan Raperbup tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk 35 Kab/Kota se-Jateng TA 2024	Pimpinan:
			Waktu	Lamanya waktu yang dibutuhkan	3 Bulan	3 Bulan berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah tentang Hasil Evaluasi Raperda dan Raperbup tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk 35 Kab/Kota se-Jateng TA 2024	Pimpinan:
3	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah Yang Sesuai Kaidah Perundangan	Tersusunnya dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Kuantitas	Jumlah Surat Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda dan Raperkada tentang APBD Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah	35 dokumen	35 Dokumen berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah tentang Hasil Evaluasi Raperda dan Raperbup tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025	Pimpinan:
			Waktu	Lamanya waktu yang dibutuhkan	3 Bulan	3 Bulan berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah tentang Hasil Evaluasi Raperda dan Raperbup tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025	Pimpinan:
4	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah Yang Sesuai Kaidah Perundangan	Terlaksananya Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Kuantitas	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Asistensi Pengeloaan Keuangan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah	1 Dokumen	1 Dokumen berdasarkan dokumen pelaksanaan asistensi	Pimpinan:

HASIL KERJA							
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET / SESEUAI EKSPEKTASI	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah Yang Sesuai Kaidah Perundangan	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Kuantitas	Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen berdasarkan dokumen pelaksanaan koordinasi dan penyusunan LKPD	Pimpinan:
6	Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Kuantitas	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 dokumen	8 dokumen berdasarkan Dokumen Renja 2025; Perubahan Renja 2024; RKA 2024, RKA Perubahan 2024; DPA 2024; DPPA 2024; Perjanjian Kinerja Tahun 2024; dan Perjanjian Kinerja Perubahan 2024	Pimpinan:
7	Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Kuantitas	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan	1 laporan berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKjIP) BPKAD TA 2023	Pimpinan:
TAMBAHAN							

RATING HASIL KERJA SESUAI EKSPEKTASI			
PERILAKU KERJA			UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
1	Berorientasi Pelayanan		
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: fast respon dan cekatan	Pimpinan:
2	Akuntabel		
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: disiplin dan berintegritas tinggi	Pimpinan:
3	Kompeten		

PERILAKU KERJA			UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: berkompeten meningkatkan kualitas diri	Pimpinan:
4	Harmonis		
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: tenggang rasa dan selektif	Pimpinan:
5	Loyal		
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: ideal dan loyal	Pimpinan:
6	Adaptif		
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: adaptif	Pimpinan:
7	Kolaboratif		
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: teamwork yang baik	Pimpinan:
RATING PERILAKU KERJA SESUAI EKSPEKTASI			
PREDIKAT KINERJA PEGAWAI BAIK			

Kota Semarang, 2 Januari 2025

Pegawai yang Dinilai

OKY HARIS SETYAWAN, S.STP, M.M
198510102003121001

Pejabat Penilai Kinerja

PEMERINTAH PROVINSI BPKAD JAWA TENGAH

RUDI NUGROHO, SE.,M.M.
197005241996031003

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	OKY HARIS SETYAWAN, S.STP, M.M	1	NAMA	RUDI NUGROHO, SE.,M.M.
2	NIP	198510102003121001	2	NIP	197005241996031003
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina / IV/a	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b
4	JABATAN	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM	4	JABATAN	SEKRETARIS
5	UNIT KERJA	SUB BAGIAN PROGRAM	5	UNIT KERJA	SEKRETARIAT BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

HASIL KERJA

NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah Yang Sesuai Kaidah Perundangan	Tersusunnya dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kuantitas	Jumlah Surat Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda dan Raperkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah	35 dokumen
			Waktu	Lamanya waktu yang dibutuhkan	3 Bulan
2	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah Yang Sesuai Kaidah Perundangan	Tersusunnya dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Kuantitas	Jumlah Surat Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda dan Raperkada tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah	35 dokumen
			Waktu	Lamanya waktu yang dibutuhkan	3 Bulan
3	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah Yang Sesuai Kaidah Perundangan	Tersusunnya dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Kuantitas	Jumlah Surat Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda dan Raperkada tentang APBD Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah	35 dokumen

HASIL KERJA					
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Waktu	Lamanya waktu yang dibutuhkan	3 Bulan
4	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah Yang Sesuai Kaidah Perundangan	Terlaksananya Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Kuantitas	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Asistensi Pengeloaan Keuangan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah	1 Dokumen
5	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah Yang Sesuai Kaidah Perundangan	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Kuantitas	Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen
6	Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Kuantitas	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 dokumen
7	Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Kuantitas	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan
TAMBAHAN					
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti			Ekspektasi Khusus Pimpinan: fast respon dan cekatan	
2	Akuntabel				
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan			Ekspektasi Khusus Pimpinan: disiplin dan berintegritas tinggi	
3	Kompeten				
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik			Ekspektasi Khusus Pimpinan: berkompeten meningkatkan kualitas diri	
4	Harmonis				

PERILAKU KERJA		
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: tenggang rasa dan selektif
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: ideal dan loyal
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: adaptif
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: teamwork yang baik

Kota Semarang, 1 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai

OKY HARIS SETYAWAN , S.STP, M.M
198510102003121001

Pejabat Penilai Kinerja

PEMERINTAH PROVINSI BPKAD JAWA TENGAH

RUDI NUGROHO , SE.,M.M.
19700324 1996031003

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA	
1.	SDM yang Paham Perencanaan Penganggaran
2.	SDM yang paham tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
3.	SDM ahli di bidang IT
4.	Sarpras yang mumpuni dan memadai
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN	
1.	Dokumen Perencanaan (berupa Renja; Renstra dan RKO) dan Dokumen Penganggaran(berupa RKA; DPA/DPPA)
2.	Dokumen evaluasi berupa LKJiP
3.	Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Hasil Evaluasi APBD Kabupaten/Kota baik Pertanggungjawaban, Perubahan maupun Murni
KONSEKUENSI	
1.	Jika dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerahtidak tepat waktu dan tepat jumlah, maka: Perencanaan Penganggaran perangkat daearh kurang berkualitas; penyerapan anggaran perangkat daerah tidak optimal yang berdampak pada tidak tercapainya target kinerja; serta Nilai SAKIP tidak memenuhi target.
2.	Jika Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota tidak tepat waktu dan sesuai kaidah Perundangan, maka: kualitas hasil evaluasi APBD Kabupaten/Kota tidak memenuhi standar; dan Penetapan APBD Kabupaten/Kota berpotensi terlambat yang menyebabkan pengenaan sanksi.

Pegawai yang Dinilai

OKY HARIS SETYAWAN , S.STP, M.M
19851010200312 1001

Kota Semarang, 1 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BPKAD

RUDI NUGROHO , SE.,M.M.
19700524 996031003